

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589–1602.
- Aprilia, S. N., Wijaya, A. F., & Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(3), 126–135.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Indrajit. (2016). *Electronic Government In Action*. Yogyakarta: Preinexus.
- Junaidi. (2015). Implementasi Electronic Government Untuk Penyelenggaraan, 5(1), 169–182.
- Mukarom, Z., & Laksana, dan M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, H., Enceng, & Amin, Z. I. (2014). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Banten: Universitas Terbuka.
- Rinaldi, H., & Yuardani, A. M. (2015). Analisis Peluang Transformasi “ E-Government ” menjadi “ E-Democracy ” melalui Website Resmi Pemerintah Daerah, 31(1), 103–112.
- Rochmah, S. (2013). *Kebijakan Pelayanan (Pertama)*. Malang: UB Press.
- Sinambela, Poltak Lijan, Sigit Rochadi, Ghazali, R., Muksin, A., Setiabudi, D., Bima, D., & Syaifudun. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan dan Kebijakan

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan

INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e government

Website

<http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita/berita/artikel/2178-melayani-partisipasi-publik-catatan-17-tahun-ombudsman-republik-indonesia.html>